

ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DI KOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015

Oleh:

Febby Randria Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Malang

Email: febby.randria@gmail.com

Abstrack

This research aimed to investigate the performance of local finance of Tarakan government regarding independency and effectiveness of local finance since 2010-2015 and to investigate the trend of independency and effectiveness of local finance of Tarakan government as far as prospective 2020. Moreover, the instruments for analysis comprised ratio of independency and ratio of effectiveness of local finance and the trend of independency and effectiveness of local finance. Furthermore, this research revealed that: 1) the ratio of independency of local finance of Tarakan since 2010-2015 averaged 159% which was categorized high; 2) Ratio of effectiveness of local finance of Tarakan since 2010-2015 tended to average 92% categorized effective; 3) the trend of independency of local finance exhibited positive trend of which tendency increased started from 2016 to 2020; and 4) the trend of effectiveness of local finance conveyed a positive trend of which tendency increased counted from 2016 to 2020.

Keywords: *ratio of independency, ratio of effectiveness, trend of independency, and trend of effectiveness*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010 sampai 2015 dan untuk mengetahui trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Tarakan hingga tahun 2020. Alat analisis yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah serta trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. 2) Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif. 3) Trend kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. 4) Trend efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Kata Kunci: rasio kemandirian, rasio efektivitas, trend kemandirian, dan trend efektivitas

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal

demikian terwujudnya kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014).

Halim (2002) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002: 128). Indikator kemandirian

keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. (Halim, 2007: 230)

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup

melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kota Tarakan yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk melakukan penelitian di Kota Tarakan.

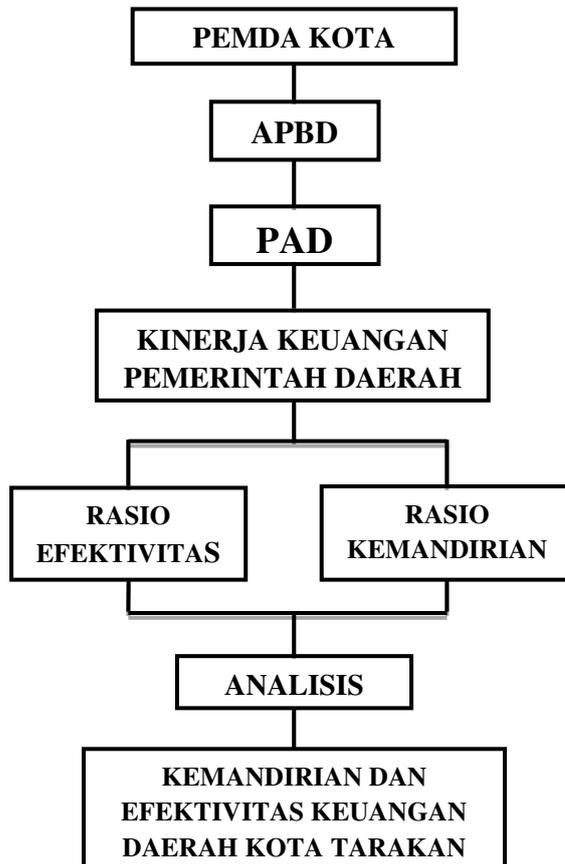
Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2014:76).

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010-2015.

Untuk mengetahui trend kemandirian dan efektivitas

keuangan daerah pemerintah Kota Tarakan hingga tahun 2020. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian (Sugiyono, 2003:11). Penelitian

Tarakan hingga tahun 2020.

kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14).

Jenis data yang akan dianalisis merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, berupa laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 s/d 2015 Pemerintah Kota Tarakan.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dokumenter. Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mencatat, merekam serta reset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif data-data untuk pengambilan keputusan, dari input data-data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dan dirumuskan, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis rasio keuangan daerah yang ditujang

dengan data-data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis rasio keuangan daerah yang dituangkan dengan data-data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tarakan sebagai berikut:

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{BPP atau Propinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Keterangan:

RK : Rasio Kemandirian

BPP : Bantuan Pemerintah Pusat

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

RE : Rasio Efektivitas

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif*, pola hubungan *konsultatif*, pola hubungan *partisipatif* dan pola hubungan *dlegatif*.

1. Pola hubungan *instruktif*, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Pola hubungan *konsultatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan *delegatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam

melaksanakan otonomi daerah. (Halim, 2004:188).

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2004

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio efektivitas keuangan daerah yang terdiri dalam lima kriteria yaitu, kriteria sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif.

Tabel 2. Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pesentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327,1996

Analisis trend kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan

kemandirian keuangan daerah tersebut. Dalam penelitian ini digunakan analisis trend dimana untuk mencari trend kemandirian keuangan daerah menggunakan alat analisis yaitu trend dengan metode kuadrat terkecil. Trend dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data pada garis trend. Maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum XY}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

Y': Nilai Trend

a : Nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X=0

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan

X : Nilai periode tahun

n : Jumlah data

(Suharyadi & Purwanto 2012: 181).

Analisis trend efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis trend dimana

untuk mencari trend kemandirian keuangan daerah menggunakan alat analisis yaitu trend dengan metode kuadrat terkecil. Trend dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data pada garis trend. Maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \Sigma XY/n$$

$$b = \Sigma XY/\Sigma X^2$$

Dimana:

Y' : Nilai Trend

a : Nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai $X=0$

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y , apabila X bertambah satu satuan

X : Nilai periode tahun

n : Jumlah data

(Suharyadi & Purwanto 2012: 181)

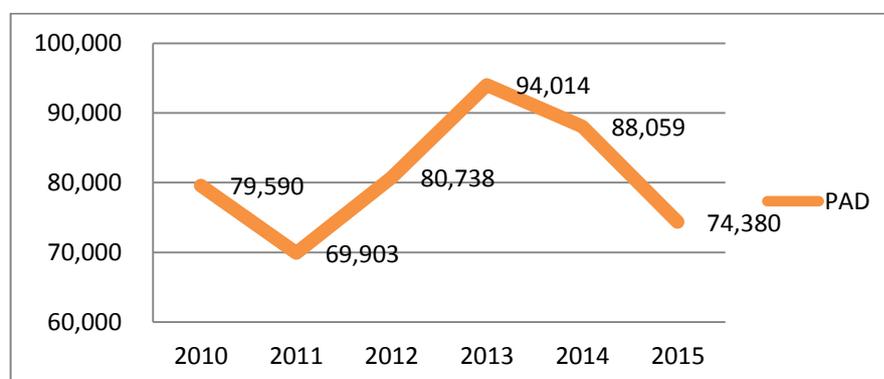
PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan

Dapat dilihat pada tabel bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan bersifat fluktuatif dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 merupakan pendapatan asli daerah (PAD) terendah di Kota tarakan yaitu sebesar Rp. 69.903.440.054,48. Dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 94.014.016.148,75.

Perekembangan Pendapatan Asli Darah Kota Tarakan tahun 2010-2015 juga dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2. Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu PAD.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah

yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284).

Melalui perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Daerah Kota Tarakan selama periode 2010 sampai dengan 2015 sudah cukup baik yaitu dengan pola hubungan *partisipatif* dan *instruktif*. Pola hubungan *partisipatif* artinya peran pemerintah pusat semakin berkurang (tingkat kemandirianya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah).

Tabel 3. Kemandirian Keuangan Kota Tarakan Tahun 2010-2015

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BANTUAN PEMERINTAH PUSAT/PROPINSI DAN PINJAMAN (BPP)	HASIL RASIO KEMANDIRIAN $\frac{PAD}{BPP} \times 100\%$	Kemampuan Keuangan/Pola Hubungan
2010	79.590.330.532,20	55.701.500.000,00	143%	Tinggi/Delegatif
2011	69.903.440.054,48	37.030.550.000,00	189%	Tinggi/Delegatif
2012	80.738.321.445,55	160.974.450.000,00	50%	Sedang/Partisipatif
2013	94.014.016.148,75	103.010.300.000,00	91%	Sedang/Partisipatif
2014	88.059.263.275,24	31.050.300.000,00	284%	Tinggi/Delegatif
2015	74.380.151.873,88	8.173.500.000,00	195%	Tinggi/Delegatif

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (data diolah, 2016)

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan
 Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli

Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

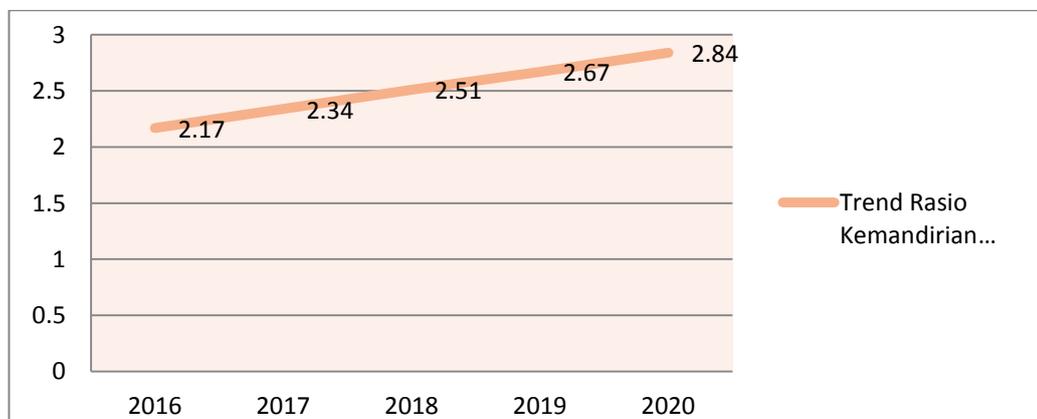
Tabel 4. Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2015

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	HASIL RASIO EFEKTIVITAS	KRITERIA
			$\frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{TARGET PAD}} \times 100\%$	
2010	93.845.048.149,52	79.590.330.532,20	85%	Cukup Efektif
2011	81.332.400.000,00	69.903.440.054,48	86%	Cukup Efektif
2012	93.369.970.967,00	80.738.321.445,55	86%	Cukup Efektif
2013	91.950.270.000,00	94.014.016.148,75	102%	Sangat Efektif
2014	103.977.569.000,00	88.059.263.275,24	85%	Cukup Efektif
2015	70.000.000.000,00	74.380.151.873,88	106%	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (data diolah, 2016)

Berdasarkan perhitungan Asli Daerah yang direncanakan tahun rasio efektivitas menyatakan bahwa 2010-2015 rata-rata cukup efektif kinerja Pemerintah Kota Tarakan dan ada pula beberapa tahun yang dalam merealisasikan Pendapatan menunjukkan kinerja sangat efektif.

Gambar 3. Grafik Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (data diolah, 2016)

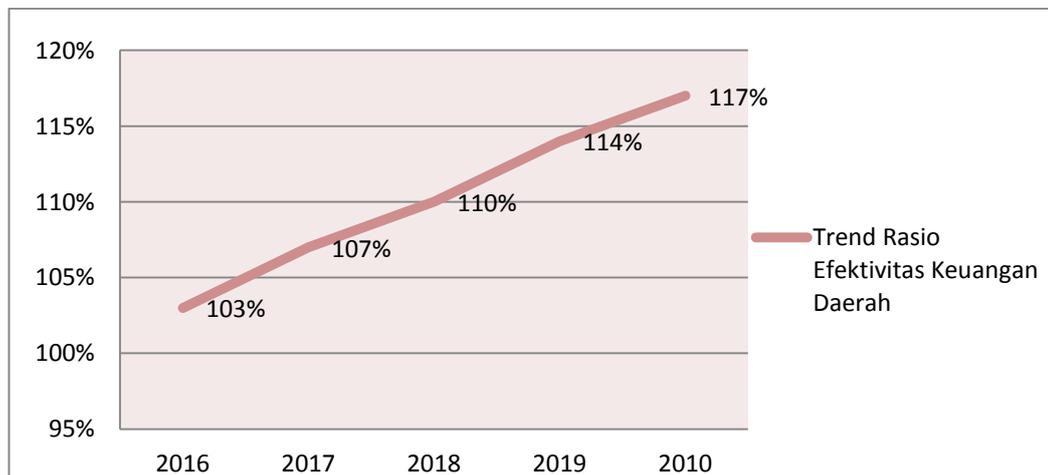
Perhitungan analisis trend kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*).

Untuk mencari persamaan $Y' = a + bX$ maka harus mencari nilai a dan b-nya terlebih dahulu. Untuk mencari a dan b ada beberapa nilai yang diperlukan yaitu Y (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah), n (jumlah data= 6) dan X (tahun). Untuk nilai X akan kesulitan jika menggunakan nilai sesungguhnya seperti tahun 2010, 2011, dan seterusnya. Oleh sebab itu digunakan

angka kode, yaitu jika data berjumlah genap maka dua tahun ditengah menggunakan nilai 0,5 dan -0,5 dan seterusnya. Maka nilai X untuk 2013 = 0,5 dan nilai X untuk 2012 = -0,5. Untuk 2011 nilainya -1,5 dan seterusnya, sedang sesudahnya yaitu 2014 diberi nilai 1,5 dan seterusnya.

Berdasarkan grafik analisis trend kemandirian keuangan menunjukkan kecenderungan trend positif. Hasil analisis memperlihatkan kecenderungan nilai trend meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Gambar 4. Grafik Trend Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (data diolah, 2006)

Perhitungan analisis trend efektivitas keuangan daerah dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*).

Berdasarkan grafik analisis trend terlihat bahwa hasil analisis menunjukkan trend positif. Hasil analisis memperlihatkan

kecenderungan nilai trend meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kota Tarakan tahun 2010-2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kota Tarakan diketahui sudah sangat mampu menjalankan atau melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Tingkat kemandirian Kota Tarakan sudah berada di antara 75%-100% yaitu dengan rata-rata 159% termasuk dalam pola hubungan *delegatif*. Tingkat ketergantungan pemerintah Kota Tarakan terhadap Pemerintah Pusat atau Propinsi sudah tidak ada. Dengan kata lain Pemerintah Kota Tarakan telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dari hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tarakan terlihat bahwa rasio kemandirian pada tahun 2010 dan 2011 cukup stabil yaitu berada pada persentase 143% dan 189% dan menurun drastis pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 50% dan 91% dan kembali naik di tahun 2014 dan 2015

dengan persentase 284% dan 195%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 dan 2013 realisasi anggaran yang ingin dicapai jauh dari target anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu pada tahun 2012 dan 2013 merupakan masa transisi dari pembentukan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara yang didalamnya termasuk Kota Tarakan.

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tarakan dari tahun 2010-2015 fluktuatif. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014 efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan masing-masing mencapai 85%, 86%, 86% dan 85% termasuk dalam kriteria cukup efektif. Dan pada tahun 2013 dan 2015 efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan masing-masing mencapai 102% dan 106% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dari hasil analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah terlihat pada tahun 2013 mengalami lonjakan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan persentase 102% dimana pada tahun sebelumnya 2010 sampai dengan 2012 persentasenya hanya sebesar

85%, 86% dan 86%. Dan kembali turun drastis pada tahun 2014 dengan persentase 85% dan kembali melonjak naik pada tahun 2015 sebesar 106%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012, tepatnya 25 Oktober 2012 Kota Tarakan menjadi bagian dari pemekaran Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, yang sebelumnya Kota Tarakan tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 dan 2013 merupakan masa transisi Kota Tarakan dan 4 Kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Dan pada tahun tersebut Kota dan Kabupaten termasuk Kota Tarakan masih bergantung dengan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada tahun 2014 dan 2015 sudah menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari hasil analisis trend kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan atau mengalami trend positif. Tahun

2016 hasil analisis menunjukkan nilai trend sebesar 217% dan terus meningkat hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 nilai trend sebesar 243%, pada tahun 2018 nilai trend sebesar 251%, pada tahun 2019 nilai trend sebesar 267% dan pada tahun 2020 nilai trend berada pada 284%. Nilai trend kemandirian menunjukkan kecenderungan meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Tarakan berada dalam kategori *delegatif*.

Dari hasil analisis trend efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil menunjukkan bahwa trend mengalami kenaikan atau mengalami trend positif. Dimana tahun 2016 hasil analisis menunjukkan nilai trend sebesar 103% dan terus meningkat hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 nilai trend sebesar 107%, pada tahun 2018 nilai trend sebesar 110%, pada tahun 2019 nilai trend sebesar 114% dan pada tahun 2020 nilai trend berada pada 117%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu

dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Kota Tarakan, terwujudnya Kota Tarakan yang mandiri dan efektif PAD apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki berkualitas dan profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Serta perlunya dilakukan sebuah pelaksanaan fungsi manajemen yang tepat baik, mulai dari tahap perencanaan hingga sampai pada tahap evaluasi baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pemerintah daerah Kota Tarakan hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah terutama disektor PAD. Penggalian sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Tarakan mampu mempertahankan bahkan menambah tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerahnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian pengembangan khususnya dalam bidang kinerja keuangan daerah. Dimana dapat menambahkan variabel lain seperti rasio efisiensi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio tingkat desentralisasi fiskal dsb. Dan bisa melakukan analisis trend terhadap variabel tambahan, sehingga dapat melihat peramalan hasil analisis rasio terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Halim Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Halim Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Refisi*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.

- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Suryadi & Purwanto S. K., 2012. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja. HAW. 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.